

## PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN

Sumiyarti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

Gmail: [sumiyarti69@gmail.com](mailto:sumiyarti69@gmail.com)

### Abstrack

*This study aims to examine the effect of the variable capital expenditure (BM) and social assistance expenditure (BBS) on economic growth and poverty in Indonesia. The research was conducted with a span of observation time from 2010 to 2017 covering 33 provinces in Indonesia. The method used in this research is a panel data regression model, which is applied to the GRDP equation and the poverty equation (POV). Based on the test results, it is found that the appropriate model used to estimate the two equations is the fixed effect model. Estimates in the GRDP equation give the results that the variable capital expenditure (BM) and social assistance expenditure (BBS) have a significant and positive effect on GRDP. This means that the more spending is carried out, the greater the value of GRDP is positive. Meanwhile, the estimation on the poverty equation (POV) shows that the GRDP variable has a significant and negative effect on poverty. The variable of social assistance spending (BBS) has a significant and positive effect on poverty. Meanwhile, capital expenditure (BM) and the open unemployment rate (TPT) do not statistically significant impact on poverty. There is an assumption that the role of government spending on poverty occurs indirectly, but through output or GRDP.*

**Keywords:** Social Expenditures; Poverty; GRDP

### PENDAHULUAN

Pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh banyak negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Todaro & Smith., 2015). Orientasi pembangunan di negara sedang berkembang mengalami beberapa perubahan. Pada awal proses pembangunan, kebanyakan negara sedang berkembang mengarahkannya untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dimengerti. Sebagai negara yang baru merdeka, pembangunan adalah strategi sarana untuk meningkatkan output perekonomian. Seiring berkembangnya perekonomian, proses pembangunan diarahkan kepada tujuan pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan. Perubahan orientasi ini adalah sebagai jawaban atas munculnya masalah kesenjangan dan kemiskinan yang diakibatkan dari strategi pembangunan yang hanya

mengejar pertumbuhan output dan tanpa memperhatikan distribusi pendapatan serta keadilan di antar para pelaku ekonomi (Alhumami, 2016).

Atas dasar tujuan pembangunan tersebut, pemerintah selalu berupaya agar target pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan dapat berjalan bersama. Negara memiliki peran penting untuk mewujudkan keduanya. Peran negara akan sangat dibutuhkan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar terjaga kestabilan ekonomi dan dapat menyejahterakan rakyat. Melalui peran ini negara menjaga rakyat agar rakyat tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran (Isnaini, 2017). Upaya menyejahterakan rakyat dan mengurangi kemiskinan dilakukan dengan mencurahkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar hasilnya dapat dirasakan secara optimal dan merata oleh seluruh rakyat (Fuadi, 2015).

Salah satu upaya mewujudkan kondisi ekonomi dan tujuan pembangunan yang diinginkan adalah melalui kebijakan fiskal. Dalam konteks makro kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan anggaran pemerintah (Case, Fair, & Oster, 2017). Di Indonesia, kebijakan fiskal tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional (pusat) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah provinsi serta kabupaten dan kota. Melalui APBN atau APBD pemerintah akan mengupayakan pendapatan dan mengatur alokasi belanja agar berdampak positif terhadap pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kemiskinan. Hal ini penting digarisbawahi sebab dalam proses perencanaan pembangunan

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin, secara bertahap telah penurunan hingga sampai satu digit. Pada bulan Maret 2012 tercatat persentase penduduk miskin sebesar 11,96% atau dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 29,25 juta orang. Selanjutnya, angka ini secara bertahap mengalami penurunan hingga pada bulan Maret 2018 hanya sebesar 9,82% atau sebanyak 25,95 juta orang penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2018). Penurunan inilah diapresiasi oleh banyak kalangan. Namun, kemiskinan juga perlu dilihat dari sisi jumlah. Sampai dengan tahun 2018, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih mencatatkan jumlah yang tidak sedikit yaitu sebanyak 25,95 juta orang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan kemiskinan yang memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk diselesaikan.

Dalam pandangan kesejahteraan, kemiskinan dikonsepsikan sebagai kebalikan dari

kemakmuran dan kesejahteraan. Konsep kesejahteraan secara ekonomi diartikan sebagai terpenuhinya barang dan jasa untuk membuat mereka hidup layak dan dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik. Berdasarkan pandangan ini maka penduduk miskin adalah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimalnya sehingga terganggu fungsi atau perannya di masyarakat. Dalam hal ini, kesejahteraan dan kemiskinan diukur dari sisi ekonomi yang dengan indikator pendapatan atau konsumsi. Penduduk miskin sebuah negara adalah penduduk yang tidak memiliki pendapatan (konsumsi) per kapita yang memadai untuk membuat mereka hidup secara layak di masyarakat (Haughton & Khandker., 2012).

Konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*) digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi dasar, yang terdiri dari makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran perkapita per bulan. Ambang batas kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sering disebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*). Dengan pengukuran kebutuhan dasar, penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan.

Dalam pandangan kesejahteraan, pendapatan atau pengeluaran lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (dan sekaligus kemiskinan). Pada skala agregat, kesejahteraan penduduk dilihat dari besarnya pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita merupakan total pendapatan atau output agregat dibagi dengan jumlah penduduk. Negara dengan pendapatan perkapita tinggi akan dimaknai sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi. Berdasarkan ukuran ini, maka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan akan dilakukan dengan meningkatkan nilai output agregat atau Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi PDB maka akan semakin besar kemampuan perekonomian untuk menyejahterakan rakyatnya.

Pentingnya pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, telah menjadikannya sebagai target pembangunan yang harus dicapai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui intervensi pemerintah dalam bentuk belanja publik. Urgensi pengeluaran atau belanja publik adalah untuk mendorong proses pembangunan. Keterbatasan sumber pembiayaan yang dimiliki oleh negara (daerah), memaksa pemerintah harus memiliki prioritas terhadap alokasi pada sektor-sektor tertentu yang lebih urgen. Sektor-sektor yang dimaksud adalah sektor yang memiliki dampak pada pemaksimalan kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti peningkatan pendapatan perkapita, distribusi pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Alokasi belanja pemerintah yang tepat, baik secara agregat, sektoral (sepergi

sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, pertahanan dan lainnya) atau menurut kategori lainnya (belanja langsung dan belanja tidak langsung) diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian dan mengatasi masalah kemiskinan.

Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup belanja langsung dan tidak langsung merupakan hal penting perencanaan pembangunan daerah. Masalahnya adalah, bagaimana serta seberapa besar belanja-belanja daerah tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja langsung berupa belanja modal dan belanja tidak langsung berupa belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi di Indonesia. Selanjutnya model yang akan dikembangkan untuk menguji pengaruh belanja modal dan belanja bantuan sosial serta peningkatan aktifitas ekonomi (PDRB) terhadap kemiskinan. Dalam model kedua ditambahkan juga variabel tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel penjelas yang diduga memengaruhi kemiskinan di Indonesia. Obyek penelitian ini adalah Indonesia yang mencakup 33 provinsi, dengan periode pengamatan 2010-2017. Kegunaan penelitian diharapkan dapat menambah khasanah literatur tentang peran pemerintah dalam mengendalikan perekonomian melalui kebijakan publik yang dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam praktek, pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar PDB (riil) perkapita tumbuh dari waktu ke waktu (Acemoglu, Laibson, & List, 2019). Teori-teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi output (PDB/PDRB) suatu negara/daerah. Dalam pandangan Keynesian, output dibentuk dari pembelajaan para pelaku ekonomi. Belanja pemerintah dianggap sebagai faktor eksogen yang dapat menjadi instrumen kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembelajaan pemerintah dapat memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pembelajaan pemerintah cenderung akan meningkatkan kesempatan kerja, profitabilitas dan investasi melalui efek multiplier yang ditimbulkan kepada permintaan agregat. Pengeluaran atau pembelajaan pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat, dan selanjutnya akan meningkatkan output melalui proses multiplier. Pada tahap akhir, peningkatan output agregat diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Peran pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan telah menarik banyak

peneliti untuk melakukan kajian. Dengan menggunakan data panel mencakup 33 provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan 2004-2013, penelitian Ginting (2015) menemukan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penelitian Hatta & Azis (2017), juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan pada di Indonesia. Studi tersebut dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel 33 provinsi pada periode 2005-2015. Pada lingkup daerah, penelitian Puspita (2015) menemukan bahwa nilai PDRB secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Studi tersebut menggunakan data panel mencakup 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang pengamatan tahun 2008-2012. Hubungan negatif antara PDRB dengan tingkat kemiskinan menyebabkan perlunya peningkatan PDRB sebagai langkah penting atau strategi untuk mengurangi kemiskinan (Mustaqimah, Hartoyo, & Fahmi, 2018).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang timbul dari ketidaktepatan pembangunan ekonomi. *World Bank* mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimal (Haughton & Khandker., 2012). Definisi itu kemudian direvisi pada tahun 2000/2001 menjadi kesenjangan dari hidup yang sejahtera. Sementara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketiadaan kemampuan yang mendasar untuk hidup layak. Semua definisi tersebut merujuk pada pengertian kemiskinan secara ekonomi, yang dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diidentifikasi dari jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Sementara kemiskinan relatif berkaitan dengan distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan ini melihat pangsa atau bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan

Ada banyak hal yang menjelaskan penyebab kemiskinan. Salah satu teori yang paling populer untuk menjelaskan kemiskinan adalah teori *vicious circle of poverty* dikemukakan oleh Ragnar Nurske. Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kekurangan modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Produktifitas yang rendah ini akan berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima. Pendapatan yang rendah berimplikasi pada tabungan dan investasi yang rendah. Investasi yang rendah ini akan mengakibatkan keterbelakangan, dan seterusnya (Kuncoro, 2006).

Pemerintah dapat memotong lingkaran atau jebakan kemiskinan ini melalui perannya dalam pembelanjaan (pusat dan daerah). Berdasarkan bidang tujuannya, belanja pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam jenis belanja ekonomi, belanja sosial dan belanja lainnya.

Belanja ekonomi dapat meliputi belanja untuk sektor-sektor produktif dan insfrastruktur. Belanja sosial dapat dipergunakan untuk pemenuhan bidang kesehatan, pendidikan, gizi atau pengaman sosial. Sedangkan belanja lainnya dapat meliputi belanja administrasi umum, pertahanan dan keamanan (Fan, Hazell, & Thorat, 1999). Dalam struktur APBN/APBD di Indonesia, pemilahan belanja dibedakan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Salah satu bentuk belanja langsung adalah belanja modal. Kategori belanja ini diperuntukkan untuk belanja modal tanah, gedung, mesin, infrastruktur, jalan, irigasi dan sebagainya. Sedangkan salah satu conoth belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Peruntukan belanja bantuan sosial diantaranya untuk belanja perlindungan sosial, belanja pemberdayaan masyarakat, belanja jaminan sosial serta belanja-belanja untuk melindungi individu/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Studi-studi berikut menguji bagaimana peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kategori pengeluaran pemerintah untuk pendidikan merupakan variabel yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Nigeria dalam rentang pengamatan 1977-2012 (Chude & Chude, 2013). Selanjutnya, dengan menggunakan data panel tahun 1980-2010 ditemukan bahwa pengeluaran untuk kesehatan dan pertahanan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika Timur (Gisore et al., 2014). Dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu signifikan terjadi dalam jangka pendek pada kasus di Malawi tahun 1980-2007. Namun dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah pada beberapa sektor menunjukkan adanya efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan tanda positif pada pengeluaran untuk pertanian dan pertahanan, dan tanda negatif pada pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan transportasi dan komunikasi (Musaba, Chilonda, & Matchaya, 2013).

Dalam kasus di Indonesia, pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari nilai PDB (Nurlina, 2015). Sementara penelitian Nurmainah (2013), menunjukkan bahwa belanja modal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode pengamatan 2003-2012. Namun dalam studi tersebut, pengaruh pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Temuan yang berbeda terdapat pada studi Sendouw *et al.* (2017), dimana belanja sosial dan pertumbuhan ekonomi juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Manado. Sedangkan belanja modal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Demikian pula, dengan menggunakan model regresi linier

berganda secara terpisah pada persamaan pertumbuhan ekonomi dan persamaan kemiskinan untuk periode 2006-2015, diperoleh hasil bahwa alokasi belanja langsung dan tidak langsung belum signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Kota Bitung (Saarce et al., 2017). Sementara studi Sari (2018) pada kasus Provinsi DIY pada periode 2007-2014 menunjukkan juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor pekerjaan umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi DIY.

## **METODE**

Dalam metodologi ini dibahas beberapa hal meliputi spesifikasi model, variabel dan pengukuran serta teknik analisa model penelitian. Spesifikasi model menggambarkan model estimasi yang akan digunakan untuk menguji hipotesa penelitian. Sementara variabel dan pengukuran menjelaskan tentang definisi variabel yang digunakan serta ukuran yang digunakan. Berikutnya teknik analisa model merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melakukan analisa model penelitian.

Penelitian ini mengambil kasus nasional yakni Indonesia dengan cakupan 33 provinsi, dengan rentang waktu pengamatan adalah periode tahun 2010-2017. Untuk menguji hipotesa pengaruh belanja modal dan belanja bantuan sosial pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia, penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan menggunakan data panel, mencakup 33 provinsi di Indonesia dengan periode 2010-2017. Terdapat dua model yang akan diestimasi dalam penelitian ini. Model pertama adalah untuk melakukan estimasi pengaruh belanja modal dan belanja bantuan sosial terhadap PDRB. Model kedua digunakan untuk melakukan estimasi pengaruh variabel belanja modal dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan, dengan menambahkan variabel PDRB dan tingkat pengangguran terbuka. Secara matematis, kedua model estimasi dirumuskan sebagai berikut :

Persamaan 1 (PDRB):

$$PDRB_{it} = Q_0 + Q_1 BM_{it} + Q_2 BBS_{it} + e_{it}$$

Persamaan 2 (Kemiskinan):

$$POV_{it} = Q_0 + Q_1 BM_{it} + Q_2 BBS_{it} + Q_3 PDRB_{it} + Q_4 TPT_{it} + e_{it}$$

Dimana :

**POV** = Kemiskinan, diukur dengan jumlah penduduk miskin, dinyatakan dalam satuan ribu orang

**PDRB** = Produk Domestik Regional Bruto, diukur dengan nilai PDRB harga konstan tahun 2010, dinyatakan dalam milyar rupiah

**BBS** = Belanja Bantuan Sosial, diukur dari besarnya komponen belanja bantuan sosial yang terdapat dalam APBD provinsi, dinyatakan dalam juta rupiah

**BM** = Belanja Modal, diukur dari besarnya komponen belanja modal APBD provinsi, dinyatakan dalam juta rupiah

**TPT** = Tingkat Pengangguran Terbuka, diukur dari persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, dinyatakan dalam satuan persen

$Q_0$  = Intersep atau konstanta

$Q_1, Q_2, Q_3, Q_4$  = parameter dari masing-masing variabel yang akan diuji

$e$  = error term

$i$  = 1,2,3,....., n (jumlah 33 provinsi di Indonesia)

$t$  = 1,2,3,....., t (jumlah tahun observasi dari 2010-2017)

Data-data yang digunakan untuk mewakili variabel-variabel tersebut adalah data runtun waktu dengan periode 2010-2017 meliputi data dari 33 provinsi di Indonesia. Data-data variabel tersebut didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik yang diakses melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) berupa data kemiskinan, produk domestik regional bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan data belanja modal dan belanja bantuan sosial diperoleh dari data keuangan daerah yang diakses dari [www.djpk.kemenkeu](http://www.djpk.kemenkeu).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dengan yang diberlakukan pada data panel terhadap kedua model (persamaan). Oleh karena itu maka, pada tahap awal dilakukan regresi untuk menentukan estimasi model yang tepat sesuai dengan data penelitian. Pemilihan model yang akan dianalisa untuk prediksi dilakukan dengan pengujian terhadap model *Common Effect*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Pengujian dilakukan menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap nilai dan tanda koefisien, uji signifikansi variabel secara parsial (uji t) dan serentak (uji F) serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Terakhir, terhadap estimasi yang sudah memenuhi pengujian akan dilakukan pembahasan berkaitan dengan temuan yang diperoleh.

## HASIL PEMBAHASAN

Sesuai dengan teknik estimasi data panel, maka hasil pengolahan data akan menghasilkan tiga buah model yaitu model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* (Wooldridge, 2013). Pemilihan model estimasi terbaik dilakukan dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Hasil pengujian terhadap persamaan 1 (PDRB) pada ketiga model yang ditunjukkan dalam tabel 1 berikut :

**Tabel 1**

**Hasil Uji Chow dan Uji Hausman untuk Penentuan Model**

Metode	Probabilita	Keputusan	Keterangan
Chow Test	0,0000	Ha diterima	Model Fixed Effect lebih baik
Hausman Test	0,0000	Ha diterima	Model Fixed Effect lebih baik

Sumber: Data diolah (Eviews 9)

Hasil pengujian dengan menggunakan uji *Chow* menunjukkan bahwa antara model *fixed effect* lebih disarankan digunakan dibandingkan model *common effect*. Demikian pula, pengujian dengan uji *Hausman* juga menghasilkan keputusan bahwa bahwa model *fixed effect* model lebih baik digunakan untuk estimasi dibandingkan model *random effect*. Sehingga diputuskan bahwa untuk model estimasi 1 (persamaan PDRB) menggunakan model *fixed effect* sebagai model estimasi terbaik. Selanjutnya hasil estimasi *fixed effect* disajikan dalam persamaan di bawah ini.

Model estimasi Persamaan 1 (PDRB):

$$PDRB_{it} = 262076.9 + 0.012817 BM_{it} + 0.324284 BBS_{it} + e_{it}$$

t- statistik    (26.60770)            (2.594796)            (8.805442)

Dengan:

$$\text{Adjusted } R^2 = 0.944842$$

$$F - \text{statistic} = 115.3738$$

$$\text{Prob (F - statistic} = 0.00000$$

Analisis pertama terhadap hasil estimasi persamaan 1 (PDRB) adalah analisis tanda dan nilai koefisien. Hasil estimasi persamaan 1 (PDRB) menunjukkan bahwa variabel belanja modal (BM) dan belanja bantuan sosial (BBS) memiliki koefisien bernilai positif masing-masing sebesar 0,12817 dan 0,32284. Kenaikan belanja modal (BM) sebesar 1 juta rupiah

akan menaikkan PDRB sebesar 0,012817 milyar rupiah. Demikian pula kenaikan belanja bantuan sosial (BBS) sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 0,324284 milyar rupiah. Pengujian signifikansi koefisien variabel independen secara parsial dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 5%. Variabel belanja modal (BM) memiliki nilai t-statistik sebesar 2.594796 dengan nilai probabilitas  $0,0000 < 0,5$ , sehingga disimpulkan bahwa variabel belanja modal (BM) secara statistik signifikan memengaruhi PDRB. Pengujian dengan uji t pada variabel belanja bantuan sosial (BBS) juga memberikan hasil yang sama. Variabel BBS secara statistik signifikan memengaruhi PDRB dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 8.805442 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0101 < 0,05$ .

Koefisien determinasi pada model PDRB (persamaan 1) adalah sebesar 0,944842. Angka ini memiliki arti bahwa variasi variabel PDRB dapat dijelaskan oleh variasi variabel belanja modal dan belanja bantuan sosial kurang lebih sebesar 94%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan. Hasil pengujian secara serentak atau global menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari F-statistik sebesar  $0,0000 < 0,05$ , maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa secara statistik variabel belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama memengaruhi output agregat atau PDRB 33 provinsi di Indonesia.

Hasil estimasi persamaan PDRB terhadap belanja modal (BM) dan belanja bantuan sosial (BBS) menunjukkan bahwa kedua variabel signifikan memberikan pengaruh positif terhadap nilai PDRB provinsi di Indonesia. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian diantaranya Nurlina (2015) dan Nurmainah (2013). Belanja modal dan belanja bantuan sosial merupakan wujud peran pemerintah dalam perekonomian dalam bentuk kebijakan fiskal. Belanja modal yang diwujudkan dalam pembelian aset tahan lama infrastruktur jalan, jaringan irigasi, serta bangunan lainnya mampu menjadi sarana untuk meningkatkan aktifitas ekonomi di daerah yang bersangkutan. Demikian pula, belanja bantuan sosial yang disampaikan ke kapad masyarakat dalam bentuk uang maupun barang mampu menambah keberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil membuktikan bahwa sebagai instrumen kebijakan fiskal, belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang berarti dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Persamaan kedua yang akan diestimasi adalah persamaan kemiskinan (persamaan 2). Estimasi persamaan ini dilakukannya dengan tahapan yang sama dengan persamaan 1. Variabel-variabel independen yang diduga menjadi penjelasnya adalah variabel belanja modal, belanja bantuan sosial, PDRB dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil pengujian model terbaik dengan uji *Chow* dan uji *Hausman* memberikan kesimpulan bahwa model *fixed*

*effect* adalah model yang lebih baik digunakan sebagai estimasi untuk persamaan kemiskinan (POV). Adapun ringkasan pengujiannya ditampilkan dalam tabel 2 berikut.

**Tabel 2**

**Hasil Uji Chow dan Uji Hausman untuk Penentuan Model**

Metode	Probabilita	Keputusan	Keterangan
Chow Test	0,0000	Ha diterima	Model <i>Fixed Effect</i> lebih baik
Hausman Test	0,0000	Ha diterima	Model <i>Fixed Effect</i> lebih baik

Sumber: Data diolah (Eviews 9)

Estimasi persamaan kemiskinan (POV) dengan *fixed effect* model memberikan hasil sebagai berikut:

Model Estimasi Persamaan 2 (POV):

$$\begin{aligned}
 POV_{it} = & 1084.627 - 0.000749 PDRB_{it} + 4.91E - 07 BM_{it} \\
 & \text{t-statistik } (28.11350) \quad (-15.30206) \quad (0.139949) \\
 + & 0.000295 BBS_{it} - 2.747051 TPT_{it} + e_{it} \\
 & (9.924572) \quad (-0.512805)
 \end{aligned}$$

Dengan:

$$\text{Adjusted } R^2 = 0.996199$$

$$F - \text{statistic} = 1915,752$$

$$\text{Prob (F - statistic} = 0,00000$$

Berdasarkan estimasi model kemiskinan (POV) di atas terlihat bahwa pengaruh variabel variabel belanja modal (BM) dan belanja bantuan sosial (BBS) memiliki tanda koefisien yang sama dengan persamaan PDRB yaitu positif. Koefisien variabel belanja modal adalah 4.91E-07 dan koefisien variabel belanja bantuan sosial adalah 0.000295. Koefisien yang bernilai negative memiliki arti bahwa kenaikan pada kedua jenis belanja pemerintah daerah ini akan memberkan pengaruh kepada meningkatnya jumlah kemiskinan. Sedangkan untuk variabel PDRB memiliki koefisien bertanda negatif dengan angka sebesar (-0,000749), artinya setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi sebesar 1 milyar rupiah maka akan mengurangi kemiskinan di daerah tersebut sebanyak 0,000749 ribu orang. Variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) memberikan pengaruh negatif dengan

koefisien (2.747051). Angka ini dapat diartikan bahwa kenaikan tingkat pengangguranterbuka 1% akan mengurangi kemiskinan sebesar 2.747051.

Hasil uji signifikansi masing-masing variabel independen dengan uji t menunjukkan bahwa dari empat variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen (POV, hanya terdapat dua variabel yang memiliki nilai probabilitas  $< 0,05$  yaitu variabel PDRB dan BBS. Dua variabel independen lainnya yaitu variabel BM dan TPT memiliki nilai probabilitas  $> 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Bantuan Sosial (BBS) secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan (POV). Sedangkan variabel Belanja Modal (BM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara statistik tidak signifikan memengaruhi kemiskinan (POV) di 33 provinsi di Indonesia.

Pengujian signifikansi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji Uji F. Berdasarkan hasil regresi, nilai dari probabilitas F-statistik adalah sebesar 1915.752. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen PDRB, BM, BBS dan TPT secara bersama-sama berpengaruh secara nyata dalam memengaruhi variabel kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia. Kriteria statistik *Goodnes of fit* yang dilihat dari nilai koefisien determinasi  $R^2$  memperlihatkan bahwa model regresi yang diperoleh memiliki nilai sebesar 0.996199. Artinya variasi variabel dependen mampu dijelaskan sebesar 99 persen oleh seluruh variasi variabel independen. Secara umum dapat dikatakan bahwa model regresi yang diperoleh memenuhi sebagai model yang layak dan baik untuk digunakan melakukan estimasi.

Pada model kemiskinan, terlihat bahwa variabel PDRB merupakan satu-satunya variabel yang secara statistik signifikan memengaruhi kemiskinan dan memiliki tanda koefisien sesuai dengan teori. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa peningkatan PDRB berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi atau yang diwakili oleh PDRB menjadi cara atau strategi untuk mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan beberapa studi sebelumnya, diantaranya Ginting (2015) dan Hatta & Azis (2017). Namun perlu diingat bahwa peningkatan output perekonomian (PDRB) perlu diikuti dengan peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat agar peningkatan kue pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat (Jayadi & Bata, 2016).

Variabel belanja bantuan sosial secara statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun dengan koefisien yang bertanda positif. Secara ekonomi, tanda positif pada koefisien belanja bantuan sosial menunjukkan bahwa peningkatan bantuan sosial

menyebabkan peningkatan kemiskinan. Hasil ini juga dimaknai bahwa belanja bantuan sosial belum mampu mengentaskan kemiskinan pada 33 provinsi di Indonesia. Belanja bantuan sosial merupakan salah satu komponen belanja tidak langsung pemerintah berupa uang, barang atau jasa, yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataannya, belanja bantuan sosial hanya memiliki porsi yang sangat kecil dari total belanja dan diperuntukkan. Bahkan, ada beberapa daerah yang tidak menyediakan anggaran belanja sosial pada tahun-tahun anggaran tertentu. Kecilnya jumlah serta porsinya dalam APBD provinsi, menyebabkan peran belanja ini belum terlihat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Variabel belanja modal secara statistik juga tidak signifikan memengaruhi kemiskinan. Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Termasuk ke dalam kelompok belanja modal adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pemanfaatan belanja langsung bisa dalam bentuk belanja modal untuk jalan, irigasi dan bangunan lainnya. Dalam praktek, dampak belanja modal dalam bentuk aset tetap belum terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum bisa terlihat dalam jangka pendek atau pada tahun yang bersangkutan. Dampak kebijakan memerlukan waktu yang cukup (jangka menengah atau jangka panjang). Kesimpulan yang sama juga terjadi terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka. Hasil sejalan dengan pendapat atau temuan Anderson et al. (2018), bahwa tidak terdapat bukti nyata bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi telah memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan pendapatan pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Variabel pengangguran terbuka (TPT) secara statistik tidak signifikan memengaruhi kemiskinan. Dalam beberapa studi variabel TPT juga tidak signifikan memengaruhi atau justru berpengaruh positif. Pengangguran mungkin menjadi salah satu penyebab kemiskinan, tetapi kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh pengangguran. Namun, sebagian studi lainnya menemukan bahwa variabel TPT dengan kemiskinan berhubungan secara positif. Dalam kasus ini maka pemerintah dapat mengupayakan penciptaan lapangan melalui peningkatan kegiatan ekonomi, serta berfokus kepada sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan industri (Ebunoluwa & Yusuf, 2018).

Apabila estimasi persamaan 2 (kemiskinan) dikaitkan dengan estimasi persamaan 1 (PDRB) akan diperoleh dugaan hubungan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada persamaan 1, variabel belanja modal (BM) dan belanja bantuan sosial (BBS) signifikan mempengaruhi PDRB. Sementara pada persamaan 2 (Kemiskinan) kedua variabel tersebut kurang signifikan untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB secara statistik signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Terdapat dugaan atau kemungkinan bahwa peran belanja modal dan belanja bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan memiliki mekanisme tidak langsung yakni melalui pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Belanja langsung (belanja modal) dan tidak langsung (belanja bantuan sosial) berpengaruh untuk meningkatkan output perekonomian (PDRB). Semakin besar nilai PDRB maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut dalam memberikan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mengatasi kemiskinan di daerah tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisa dan pembahasan penelitian tentang pengaruh belanja modal dan belanja bantuan sosial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 33 provinsi di Indonesia dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kebijakan fiskal sebagai bagian dari kebijakan publik memiliki peranan yang penting dalam menggerakkan mempengaruhi jalannya perekonomian pada 33 provinsi di Indonesia. Aktifitas ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dipengaruhi melalui instrumen belanja langsung seperti belanja modal dan belanja tidak langsung berupa seperti belanja bantuan sosial. Kedua, hasil analisa pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap kemiskinan menguatkan pandangan bahwa peningkatan aktifitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi) menjadi modal yang diperlukan atau prasyarat terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan. Daerah yang memiliki aktifitas ekonomi (PDRB) tinggi akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menyejahterakan rakyatnya dibandingkan daerah dengan PDRB yang lebih rendah. Namun hal ini harus disertai distribusi pendapatan yang merata. Ketiga, berdasarkan analisa persamaan PDRB dan persamaan kemiskinan terdapat dugaan bahwa belanja pemerintah (belanja modal dan belanja bantuan sosial) memengaruhi kemiskinan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Namun kesimpulan ini masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Selanjutnya, saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah perlu mengefektikan belanja yang dilakukan

agar pencapaian *output* dan *outcome* lebih optimal. Langkah ini tentunya harus disertai dengan pengawasan untuk menghindari dari pemborosan dan kebocoran, sehingga target pengeluaran akan tepat sasaran. Kedua, pemerintah harus mengupayakan agar terjadi peningkatan aktifitas atau pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tinggi, serta memastikan agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan agar peningkatan aktifitas ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pelaku ekonomi. Ketiga, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pengembangan metode atau teori untuk menguji dugaan pengaruh tidak langsung dari belanja modal dan belanja sosial terhadap kemiskinan pada 33 provinsi di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. A. (2019). *Makroekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Alhumami, A. (2016). *Evolusi Pemikiran Pembangunan* (pp. 1–5). pp. 1–5. Retrieved from [https://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/4364/05amich\\_20091014125824\\_2251\\_\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3513/4986/4364/05amich_20091014125824_2251__0.pdf)
- Anderson, E., d'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018). Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. *World Development*, *103*, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2017). *Macroeconomics Principles of* (Twelfth). Pearson.
- Chude, N. P., & Chude, D. I. (2013). IMPACT OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA. *International Journal of Business and Management Review*, *1*(4), 64–71. Retrieved from <http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Impact-of-Government-Expenditure-on-Economic-Growth-in-Nigeria.pdf>
- Ebunoluwa, O. O., & Yusuf, W. A. (2018). Effects of Economic Growth on Poverty Reduction In Nigeria. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, *9*(5), 25–29. Retrieved from <http://www.iosrjournals.org/>
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (1999). Linkages between government spending, growth, and poverty in rural India. *Research Report of the International Food Policy Research Institute*, (110).
- Ginting, A. M. (2015). The Influence of Regional Disparity on Poverty in Indonesia During 2004-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *20*(1), 45–58. Retrieved from [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrwXxQvqMVfj0YANCv3RQx.;\\_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1606817967/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjurnal.dpr.go.id%2Findex.php%2Fkajian%2Farticle%2Fview%2F569%2F464/RK=2/RS=INC.y1LM1mTRgVHPMD5Z.PCKhaE-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrwXxQvqMVfj0YANCv3RQx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1606817967/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjurnal.dpr.go.id%2Findex.php%2Fkajian%2Farticle%2Fview%2F569%2F464/RK=2/RS=INC.y1LM1mTRgVHPMD5Z.PCKhaE-)
- Gisore, N., Kiprop, S., Kalio, A., & Ochieng, J. (2014). Effect of Government Expenditure on Economic Growth in East Africa: A Disaggregated Model. *European Journal of Business and Social Sciences*, *3*(8), 289–304.
- Hatta, M., & Azis, A. (2017). Analisis Faktor Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

- Periode 2005-2015. *Economics Bosowa Journal*, 3(008), 16–32. Retrieved from <http://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/download/126/132>
- Houghton, J., & Khandker., S. R. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Equality)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jayadi, D. S., & Bata, A. G. (2016). Kemiskinan Di Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 2004 – 2012. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 28(1), 87–99.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Keempat*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN.
- Musaba, E., Chilonda, P., & Matchaya, G. (2013). Impact of Government Sectoral Expenditure on Economic Growth in Malawi, 1980-2007. *Journal of Economics and ...*, 4(2), 71–79. Retrieved from <http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/4128>
- Mustaqimah, K., Hartoyo, S., & Fahmi, I. (2018). Peran Belanja Modal Pemerintah Dan Investasi Pembangunan Manusia Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.29244/jekp.6.2.1-15>
- Nurlina, N. (2015). The effect of government expenditures on Indonesia economic growth. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.14414/jebav.v18i1.377>
- Nurmainah, S. (2013). ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH ,TENAGA KERJA TERSERAP DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN (Studi kasus 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141. Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3158>
- Puspita, D. A. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics and Policy*, 8(1), 100–107. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>
- Saarece, Y., Lantu, M., Koleangan, R. A. M., Rotinsulu, T. O., Langsung, B. T., & Ekonomi, P. (2017). Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bitung. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 18(5), 1–19. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/15785/15296>
- Sari, N. I. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014. *Economics Development Analysis Journa*, 7(2), 128–136. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Sendouw, A., Rumatte, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2017). PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA SOSIAL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MANADO. *JURNAL PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(2), 1–15. Retrieved from <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1377052>
- Todaro, M. P., & Smith., S. C. (2015). *Economic Development (Twelfth Edition ed.)*. Pearson.
- Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory Econometrics: A Modern Approach 5th Edition*. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4164>